

DAFTAR BACAAN

BUKU-BUKU

- Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Adrian Sutedi, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2016.
- Bismar Nasution, *Rezim Anti Pencucian Uang di Indonesia*, Books Terrace, Medan, 2017.
- Deny Susanto, *Hukum Korporasi di Indonesia dalam Pendekatan GRC Terintegrasi*, Deepublish, Yogyakarta, 2021.
- Eva Achjani Zulfa, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1991.
- Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2017.
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris)*, Cetakan ke-8, Refika Aditama, Bandung, 2018.
- Habib Adjie, *Pasal per Pasal Undang-Undang Jabatan Notaris dan Rezim Sanksinya*, Refika Aditama, Bandung, 2021.
- Hans Kelsen. terjemahan Raisul Mutaqien, *Teori Hukum Murni*, Nuansa & Nusamedia, Bandung, 2006.
- Hartanti Sulihandari & Nisya Rifiani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris Berdasarkan Peraturan perundang-Undangan Terbaru*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2013.
- Muladi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Habibie Center, Jakarta, 2002.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, 2010.

- Munir Fuady, *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Cetakan ke-5, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011.
- R. Ridwan Pratama, *Hukum Kenotariatan: Teori dan Praktik Pembuatan Akta Autentik*, Andi Offset, Yogyakarta, 2020.
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2014.
- R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1982.
- Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Soetardjo Soemoatmodjo, *Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang Kelas II*, Liberty, Yogyakarta, 1986.
- Sudaryat, *Hukum Perusahaan Indonesia: Pendirian, Tata Kelola, dan Pembubaran*, Prenada Media, Jakarta, 2025.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2019.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Perusahaan*, Cetakan ke-2, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2007.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2007.
- Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif Empiris dan Gabungan*, Cetakan Pertama, Unigres Press, Gresik, 2022.
- Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2019.
- Yunus Husein, *Negara, Pencucian Uang, dan Kejahatan Terorganisasi*, Pustaka Juanda Tiga Lima, Jakarta, 2008.

JURNAL

- Agus Dwi Haryanto, *Prinsip Kehati-hatian Notaris Dalam Membuat Akta Kuasa Menjual*, Jurnal Bevinding, Vol. 01 No. 01, 2023.
- Annisa Fitria, *Kedudukan Beneficial Owner Dalam Perseroan Terbatas Dalam Hukum Positif Di Indonesia*, Lex Jurnalica, Vol. 19 No. 1, 2022.

- Brilian Pratama, *Prinsip Kehati-Hatian Dalam Membuat Akta Oleh Notaris*, Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 11, No. 1, 2022.
- Fikri Ariesta Rahman, *Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Mengenal Para Penghadap*, Lex Renaissance, Vol. 2, No. 3, 2018.
- Fitra Amalia, Eddy Pratomo, Fitra Deni, *The Principle of Notary Negligence in Drafting Sale and Purchase Agreements (PPJB) Containing Elements of Criminal Conspiracy*, Vol. 5, No. 3, International Journal of Humanities Education and Social Sciences, 2025.
- Iip Purwantini Jeane Mamonto, *Penerapan Prinsip Kehati-hatian Melalui Sifat Aktif Notaris dalam Proses Due Diligence*, Jurist Academia: Journal of Legal Academics and Practitioners, Vol. 1, No. 2, 2025.
- Mamonto, I. P. J, *Penerapan Prinsip Kehati-hatian Melalui Sifat Aktif Notaris dalam Proses Due Diligence*, Jurist Academa, Vol. 1, No. 2, 2025.
- M. Adli Afriansyah, Rosmidah, Syamsir, *Akibat Hukum Cacat Formil dan Cacat Materiil pada Akta Notaris dalam Pembuktian Hukum di Indonesia*, SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah, Vol. 5, No. 3, 2026.
- M. Haris Hasyim, Rusdianto Sesung, *Peranan Notaris dalam Kepastian Hukum Prinsip Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) Berdasarkan Permenkumham Nomor 13 Tahun 2018*, Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial, Vol. 2 No. 2, 2024.
- Muhammad Hafidh, *Beneficial Owner: Mengenali Pemilik Manfaat dalam Tindak Pidana Korporasi*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 20, No. 1, 2020.
- Raden Krishnaputri Devi Kusumawati, Yurisa Martanti, Dedy Ardian Prasetyo, *Antara Autentisitas dan Kepastian Hukum: Analisis Terhadap Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang Tidak Dibacakan di Hadapan Notaris*, Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol. 12, No. 1, 2025
- Riska Fitriani, *Prinsip Kehati-hatian Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik*, Jurnal Hukum dan Kenotariatan, Vol. 6, No. 2, 2021.
- Siti Sundari Rangkuti, *“Transparansi Beneficial Ownership dalam Perspektif Hukum Korporasi,”* Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 26 No. 3, 2019.

Yolanda Yuliani Pradigdo, Jusup Jacobus Setyabudhi, Andyna Susiawati Achmad, *Perlindungan Hukum terhadap Notaris atas Pemalsuan atau Penyalahgunaan Akta oleh Penghadap (Analisis Putusan MA No. 432 K/Pid/2022)*, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol. 3, No. 6, 2025.

Yunus Husein, *Peran Profesi Penunjang dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 48 No. 2, 2018.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi.